
Urgensi Kurikulum Pendidikan Islam Sebagai Media Pemersatu Kemajemukan Sosial Kultur

Miswanto^{1*}, Wafiq Azizah²

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

*Corresponding Author: miswanto@stai-ibnusina-batam.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the urgency of the Islamic education curriculum as a unifying medium in addressing social and cultural pluralism in society. An inclusive and multicultural curriculum is essential to instill values of tolerance, justice, compassion, and moderation among students. The development of an Islamic education curriculum that is responsive to social diversity requires integrative and participatory strategies, as well as enhancing teacher competence and providing relevant learning resources. Despite challenges such as resistance and limited resources, solutions including training, socialization, and community empowerment are implemented to optimize the inclusive curriculum's implementation. Thus, the Islamic education curriculum plays a crucial role in building a harmonious and civilized society amid cultural and social plurality.

Keywords: Islamic, Education Curriculum, Uniting Social, Cultural Diversity

Citation (APA Style): Miswanto, & Azizah, W. (2025). Urgensi Kurikulum Pendidikan Islam Sebagai Media Pemersatu Kemajemukan Sosial Kultur. *Journal of Islamic Educational Development*, 2(1), 28–40.

PENDAHULUAN

Kemajemukan sosial dan kultural merupakan realitas yang tak terelakkan dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya di Indonesia yang dikenal sebagai negara multikultural dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Di satu sisi, keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa yang dapat memperkuat identitas nasional. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan bijaksana, potensi konflik dan disintegrasi sosial dapat muncul. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu yang inklusif, toleran, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah perbedaan.

Pendidikan Islam, sebagai salah satu subsistem pendidikan nasional, memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam membangun peradaban yang damai dan berkeadaban. Kurikulum pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu keislaman, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan sikap sosial dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Melalui pendekatan nilai-nilai Islam yang menekankan pada keadilan, kasih sayang, persaudaraan, dan toleransi, kurikulum ini berpotensi menjadi media pemersatu dalam masyarakat yang majemuk secara sosial dan kultural.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Islam belum sepenuhnya diformulasikan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk merespons tantangan kemajemukan. Masih terdapat kecenderungan pendekatan eksklusif, normatif, dan kurang dialogis dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, urgensi reformulasi kurikulum pendidikan Islam menjadi semakin penting, agar mampu menjawab kebutuhan zaman dan berkontribusi dalam membangun kohesi sosial.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi kurikulum pendidikan Islam sebagai media pemersatu dalam kemajemukan sosial kultur. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, artikel ini akan mengeksplorasi nilai-nilai dasar dalam Islam yang relevan untuk

membangun harmoni sosial, serta mengevaluasi peran dan tantangan kurikulum pendidikan Islam dalam konteks keindonesiaan yang plural.

Dalam perkembangan globalisasi dan era digital saat ini, interaksi antarindividu dari latar belakang yang berbeda semakin intens dan kompleks. Hal ini menuntut sistem pendidikan, termasuk pendidikan Islam, untuk memiliki kurikulum yang responsif terhadap perubahan sosial serta mampu memperkuat nilai-nilai moderasi dan toleransi. Kurikulum tidak hanya harus mencerminkan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin, tetapi juga harus menyentuh aspek kehidupan sosial yang nyata, dengan menanamkan kesadaran akan pentingnya hidup bersama secara damai di tengah perbedaan.

Urgensi ini semakin diperkuat dengan munculnya berbagai fenomena intoleransi, polarisasi sosial, dan penyalahgunaan ajaran agama untuk kepentingan tertentu, yang seringkali justru memecah belah masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan Islam harus tampil sebagai agen transformasi sosial yang mampu menawarkan solusi melalui penguatan nilai-nilai inklusif dalam kurikulumnya. Proses pendidikan seharusnya menjadi ruang dialog dan refleksi yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, terbuka, dan menghargai keberagaman.

Kurikulum pendidikan Islam yang ideal seharusnya dirancang dengan pendekatan integratif—menggabungkan nilai-nilai spiritual Islam dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, serta memadukan dimensi tekstual (nash) dan kontekstual (realitas sosial). Dengan pendekatan semacam ini, pendidikan Islam dapat memainkan peran signifikan dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan spiritual, tetapi juga matang secara sosial dan emosional.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan Literatur Riview, yang bertujuan untuk menganalisis Urgensi Kurikulum Pendidikan Islam Sebagai Media Pemersatu Kemajemukan Sosial Kultur. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Metode penunjang yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur, yang mengacu pada pengumpulan dan analisis berbagai referensi terkait kurikulum pendidikan Islam, strategi pengembangan kurikulum yang adaptif, serta pengembangan karakter dalam Pendidikan serta kurikulum merdeka. Buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan topik ini menjadi sumber utama untuk memahami konsep-konsep dasar pendidikan Islam, strategi kurikulum, serta pendekatan yang digunakan dalam pendidikan Islam di berbagai negara.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum pendidikan Islam merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam proses kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Kurikulum ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek kognitif (penguasaan ilmu), tetapi juga mencakup aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (perilaku), serta berorientasi pada pembentukan pribadi muslim yang utuh dan berakhlak mulia.

Hasan Langgulung, kurikulum pendidikan Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam dalam membimbing peserta didik agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ia menekankan bahwa pendidikan Islam memiliki ciri khas tersendiri karena bersumber dari ajaran wahyu, bukan hanya rasio manusia semata. (Hasan Langgulung, 1986)

Menurut Abuddin Nata: 2005 mengatakan, kurikulum pendidikan Islam merupakan seperangkat nilai dan materi ajar yang berlandaskan ajaran Islam, yang disusun secara sistematis untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik baik jasmani maupun rohani, dalam rangka mencapai tujuan hidup yang diridhai Allah SWT. Kurikulum ini memiliki peran sentral dalam menyelaraskan antara aspek spiritual dan intelektual peserta didik dalam bingkai nilai-nilai Islam.

kurikulum pendidikan Islam tidak sekadar menyampaikan ilmu-ilmu keislaman, seperti fikih, tauhid, atau Al-Qur'an, tetapi juga membentuk karakter dan wawasan keislaman yang

mampu merespons dinamika sosial-kultural masyarakat secara bijak. Kurikulum ini idealnya menjadi sarana internalisasi nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, persaudaraan, kasih sayang, dan toleransi.

Secara historis, kurikulum pendidikan Islam telah mengalami dinamika sejak masa klasik Islam, di mana ilmu-ilmu agama dan umum (seperti matematika dan kedokteran) diajarkan secara terpadu di lembaga-lembaga pendidikan seperti masjid, madrasah, dan halaqah. Pada masa itu, kurikulum dirancang tidak hanya untuk mencetak ahli ibadah, tetapi juga untuk melahirkan ilmuwan dan pemimpin yang berakhlak. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, pendidikan Islam tidak bersifat dikotomis, tetapi holistik — mencakup aspek dunia dan akhirat secara seimbang. (Badri Yatim, 2012)

konteks kontemporer, kurikulum pendidikan Islam perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan tantangan zaman, seperti globalisasi, krisis moral, dan keragaman budaya. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam modern dituntut tidak hanya mengajarkan doktrin keagamaan, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan sosial, pemikiran kritis, dan kemampuan berdialog dengan perbedaan. Hal ini selaras dengan pemikiran Azra, yang menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mampu melahirkan insan yang religius sekaligus terbuka terhadap kemajemukan dan kemodernan. (Azyumardi Azra, 2012)

Kurikulum pendidikan Islam juga memiliki dimensi ideologis, di mana nilai-nilai tauhid menjadi dasar utama dalam merancang tujuan dan materi ajar. Tauhid tidak hanya dipahami sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai prinsip etis yang menuntut keadilan, persamaan hak, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam idealnya mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga aktif dalam mewujudkan tatanan sosial yang damai dan adil. (M. Amin Abdullah, 2005)

kurikulum pendidikan Islam juga harus bersifat dinamis dan kontekstual. Artinya, ia harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam kerangka ini, pendekatan integratif dan dialogis menjadi sangat penting agar kurikulum mampu menjawab kebutuhan peserta didik di tengah masyarakat yang plural dan kompleks.

Kurikulum Pendidikan Islam merupakan suatu perangkat sistematis yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang didesain untuk membentuk pribadi muslim yang utuh, baik secara spiritual, intelektual, sosial, maupun moral. Kurikulum ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada pembinaan akhlak dan kepribadian sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Abuddin Nata, 2006, kurikulum pendidikan Islam adalah keseluruhan program pembelajaran yang dirancang secara sadar dan terorganisasi dalam lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Kurikulum ini juga mencakup integrasi antara ilmu-ilmu keislaman (seperti tafsir, hadis, fikih, akhlak) dengan ilmu pengetahuan umum, sehingga menciptakan harmonisasi antara wahyu dan akal.

Sementara itu, Ahmad Tafsir menekankan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus dibangun atas dasar nilai-nilai tauhid sebagai pondasi utamanya. Ia menegaskan bahwa tujuan utama kurikulum dalam pendidikan Islam adalah mengantarkan manusia untuk mengenal, mengabdikan, dan mendekatkan diri kepada Allah, seraya tetap mampu hidup bermasyarakat dan membangun peradaban (Ahmad Tafsir, 2005). Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam tidak bersifat sekuler atau terpisah dari kehidupan sehari-hari, melainkan mencerminkan keterpaduan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Kurikulum ini harus juga peka terhadap realitas sosial dan perkembangan zaman, sehingga mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan kemasyarakatan secara islami, inklusif, dan transformatif.

kurikulum pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan keagamaan secara tekstual, tetapi juga membentuk karakter dan budaya berpikir Islami yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika zaman. Kurikulum ini bertugas sebagai alat strategis dalam membentuk peradaban Islam yang berkembang, melalui pembinaan peserta didik agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional mereka. Sejalan dengan ini, Zuhairini dkk menyatakan bahwa kurikulum pendidikan Islam merupakan seperangkat program yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara

menyeluruh, yakni terbentuknya manusia muslim yang mampu menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. (Zuhairini, 2004)

Lebih lanjut, Hasan Langgugung mengemukakan bahwa kurikulum pendidikan Islam bukanlah sekadar kumpulan mata pelajaran, melainkan suatu struktur pendidikan yang menyatu dengan tujuan hidup manusia menurut Islam, yakni menjadi hamba Allah dan khalifah di bumi (Hasan Langgugung, 1990). Oleh karena itu, setiap komponen dalam kurikulum—baik itu materi, strategi pengajaran, maupun evaluasi—harus berlandaskan pada nilai-nilai syariah dan akhlak Islamiah, serta mampu menanamkan kesadaran spiritual, tanggung jawab sosial, dan etos kerja islami.

Dalam perkembangan kontemporer, konsep kurikulum pendidikan Islam juga mengalami transformasi. Saat ini, kurikulum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang statis, melainkan bersifat dinamis dan adaptif terhadap tantangan global, seperti pluralitas budaya, perkembangan teknologi informasi, serta isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam modern dituntut untuk menyelaraskan nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kemampuan kolaborasi, dan literasi digital. Hal ini sejalan dengan pandangan Azyumardi Azra yang menekankan pentingnya reformulasi kurikulum pendidikan Islam agar tidak terjebak pada pendekatan dogmatis dan tekstualistik semata, tetapi juga mendorong pengembangan nalar rasional, inklusif, dan transformatif. (Azyumardi Azra, 1999)

Konsep Kemajemukan Sosial dan Kultur

Kemajemukan sosial dan kultur (kultural) adalah sebuah kenyataan sosiologis yang menunjukkan keberadaan beragam kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda dalam satu ruang sosial. Perbedaan tersebut dapat meliputi aspek agama, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, sistem nilai, gaya hidup, dan struktur sosial. Kemajemukan ini merupakan karakter dasar dari hampir seluruh masyarakat modern, khususnya di negara-negara seperti Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan tingkat pluralitas sosial-budaya yang sangat tinggi.

Menurut Koentjaraningrat: 2009, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem ide, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar. Oleh karena itu, kultur atau budaya tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Kemajemukan kultur muncul karena manusia hidup dalam kelompok yang berbeda-beda, yang masing-masing mengembangkan identitas, nilai, dan kebiasaannya secara khas.

Kemajemukan sosial, di sisi lain, mencakup struktur masyarakat yang beraneka ragam berdasarkan status sosial, kelas ekonomi, pendidikan, pekerjaan, serta peran-peran sosial lainnya. Dalam masyarakat majemuk (plural society), perbedaan ini bukan hanya eksistensi yang bersifat individual, melainkan terorganisir dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki kesadaran kolektif tentang identitas mereka (Nasikun: 2006). Menurut Clifford Geertz, masyarakat seperti Indonesia merupakan plural society di mana kelompok-kelompok etnis dan agama hidup berdampingan namun memiliki batas sosial yang cukup kuat. (Clifford Geertz, 1973)

Kemajemukan dapat menjadi kekuatan positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jika dikelola secara bijaksana, karena ia membuka ruang bagi terjadinya pertukaran ide, pengayaan budaya, dan peningkatan kualitas hidup bersama. Namun, tanpa manajemen sosial yang tepat, kemajemukan juga dapat memunculkan gesekan, konflik antar kelompok, serta perpecahan sosial yang berujung pada disintegrasi.

Dalam konteks pendidikan, pemahaman terhadap kemajemukan sosial dan kultur menjadi penting untuk ditanamkan kepada peserta didik sejak dini. Pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan kerja sama antar kelompok yang berbeda. Pendidikan multikultural menjadi salah satu pendekatan penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.

Kurikulum pendidikan Islam memiliki fungsi strategis dalam mengelola kemajemukan sosial dan kultural di tengah masyarakat. Fungsi ini tidak hanya bersifat normatif—yakni sebagai sarana pewarisan nilai-nilai Islam—tetapi juga transformatif, yaitu sebagai alat untuk membentuk

kepribadian peserta didik yang adaptif, inklusif, dan mampu berinteraksi secara konstruktif dengan keragaman sosial di sekitarnya.

Pertama, kurikulum pendidikan Islam berfungsi sebagai instrumen pembinaan akhlak dan karakter. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, nilai-nilai seperti toleransi (tasamuh), keadilan (al-'adalah), persaudaraan (ukhuwwah), dan kasih sayang (rahmah) menjadi landasan etika sosial yang sangat penting. Nilai-nilai ini secara eksplisit diajarkan dalam ajaran Islam dan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum melalui pendekatan kontekstual, baik dalam materi akidah, fikih, maupun akhlak. (Zakiyuddin Baidhaw, 2005)

Kedua, kurikulum berperan dalam membentuk sikap keberagaman yang moderat dan terbuka. Pendidikan Islam yang hanya berorientasi pada aspek doktrinal dan formalitas keagamaan berisiko menghasilkan pandangan sempit dan eksklusif terhadap kebenaran. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam perlu diarahkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman agama yang mendalam namun tetap mampu menghargai perbedaan. Hal ini sesuai dengan semangat wasathiyah (moderasi) yang merupakan ciri khas umat Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 143).

Ketiga, kurikulum menjadi alat integrasi nilai keislaman dengan nilai kebangsaan dan kemanusiaan universal. Dalam konteks negara seperti Indonesia yang majemuk, penting bagi pendidikan Islam untuk menanamkan semangat kebangsaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Kurikulum harus mampu menunjukkan bahwa komitmen keagamaan tidak berarti menolak perbedaan, melainkan justru menjadi kekuatan dalam membangun perdamaian dan keadilan sosial. (Muhammad Ali, 2003)

Keempat, kurikulum berfungsi sebagai media dialog antarbudaya dan antaragama. Pendidikan Islam dapat menjadi ruang aman (safe space) bagi peserta didik untuk belajar tentang toleransi secara praktis, melalui diskusi lintas perspektif, studi kasus multikultural, serta penguatan nilai-nilai empati. Melalui pendekatan pedagogis yang dialogis, kurikulum dapat membantu meruntuhkan stereotip dan membangun pemahaman yang saling menghargai antar kelompok yang berbeda. (Syamsul Arifin, 2011)

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara maksimal, kurikulum pendidikan Islam dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan kohesi sosial dan mencegah terjadinya polarisasi identitas di tengah masyarakat yang plural.

Kemajemukan sosial dan kultur merupakan realitas objektif yang melekat pada masyarakat Indonesia. Kemajemukan sosial mengacu pada keragaman yang terdapat dalam struktur sosial masyarakat, seperti perbedaan kelas ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan, serta akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Diferensiasi sosial ini menimbulkan stratifikasi dan potensi ketimpangan jika tidak disikapi dengan kebijakan dan pendekatan yang adil. Menurut Nasikun, masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori masyarakat majemuk karena memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi dalam berbagai aspek sosial, dan kondisi ini rentan terhadap konflik jika tidak disertai kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan dan kesetaraan.

Sementara itu, kemajemukan kultur merujuk pada keragaman budaya yang mencakup bahasa daerah, adat istiadat, sistem kepercayaan, seni, serta nilai-nilai tradisional yang dianut oleh masing-masing komunitas. Setiap kelompok budaya memiliki sistem nilai dan cara hidup yang membentuk identitas kulturalnya. Clifford Geertz menggambarkan Indonesia sebagai mosaic society, yakni masyarakat yang terdiri dari mozaik budaya yang kuat dan beragam, di mana masing-masing kelompok memiliki loyalitas yang tinggi terhadap identitas budaya mereka sendiri². Keberagaman ini, bila tidak disertai sikap saling menghargai, berisiko menimbulkan eksklusivisme dan potensi konflik antarbudaya.

Namun demikian, kemajemukan bukanlah ancaman jika dikelola secara bijak. Sebaliknya, ia merupakan potensi besar dalam membangun masyarakat yang kaya secara intelektual, spiritual, dan kultural. Dalam konteks ini, pendidikan memegang peran sentral dalam membentuk kesadaran inklusif di tengah keberagaman. Pendidikan Islam, khususnya, diharapkan mampu berperan sebagai agen pemersatu yang menanamkan nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi (tasamuh), dan persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah) kepada peserta didik. Melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai tersebut secara kontekstual dan aplikatif, peserta didik dapat kondisikan untuk hidup damai dalam masyarakat yang plural.

Kemajemukan dan Relevansinya dalam Pendidikan

Kemajemukan sosial dan kultur bukan hanya sebuah fakta sosiologis, melainkan juga sebuah tantangan dan peluang dalam proses pendidikan. Di sinilah pentingnya pendidikan yang tidak sekadar mengajarkan hafalan doktrin agama, tetapi juga menumbuhkan keterbukaan dan empati terhadap keberagaman. Pendidikan Islam, dengan semangat rahmatan lil 'alamin, memiliki potensi untuk membentuk cara pandang yang menghargai perbedaan sebagai sunnatullah, bukan sebagai ancaman. Dalam hal ini, pendidikan Islam perlu merumuskan kurikulum yang tidak bersifat eksklusif dan homogen, melainkan mengakomodasi keberagaman sebagai sumber pembelajaran.

Sebagaimana dikemukakan oleh Banks, (James A. Banks, 2009) pendekatan multikultural dalam pendidikan harus melibatkan rekonstruksi kurikulum agar mencerminkan pengalaman, sejarah, dan perspektif dari berbagai kelompok etnis dan budaya dalam masyarakat. Pendidikan yang mampu mengakomodasi perbedaan ini akan memupuk sikap saling menghargai, mengurangi prasangka, serta membentuk solidaritas sosial.

Peran Lembaga Pendidikan dalam Pengelolaan Kemajemukan

Lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, harus menjadi ruang sosial yang aman bagi semua identitas. Ini berarti bahwa pengelolaan kemajemukan tidak cukup hanya pada tingkat kebijakan, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah: mulai dari sistem pembelajaran, interaksi guru-murid, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Dalam praktiknya, ini mencakup penghapusan diskriminasi berbasis suku, bahasa, agama, dan latar belakang sosial-ekonomi.

Sebagai contoh, penerapan pendekatan pembelajaran berbasis proyek sosial (project-based learning) yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dapat memperkuat solidaritas dan kepekaan terhadap perbedaan. Metode ini tidak hanya mengajarkan materi akademik, tetapi juga nilai-nilai hidup bersama yang menjadi fondasi dari masyarakat majemuk yang harmonis.

Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola kemajemukan sosial dan kultural di tengah masyarakat yang multikultural. Pendidikan merupakan sarana utama dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan saling menghargai perbedaan sejak usia dini. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan—khususnya yang berbasis Islam—tidak hanya bertugas menyampaikan materi akademik dan keagamaan, tetapi juga menjadi wahana pembentukan karakter dan sikap sosial yang terbuka terhadap keragaman. Lembaga pendidikan harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, adil, dan ramah terhadap berbagai identitas—baik agama, suku, bahasa, maupun budaya. Lingkungan pendidikan yang inklusif akan memfasilitasi terjadinya interaksi positif antar peserta didik dari latar belakang yang berbeda, sehingga memperkuat kohesi sosial dan membentuk budaya damai dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, kurikulum dan metode pembelajaran yang diterapkan di lembaga pendidikan harus sensitif terhadap isu-isu keberagaman. Pembelajaran yang bersifat dialogis, partisipatif, dan kontekstual akan membantu peserta didik memahami bahwa perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan dapat menjadi sumber kekuatan dalam membangun peradaban. Guru sebagai aktor utama pendidikan juga harus memiliki kompetensi multikultural, yaitu kemampuan untuk membimbing siswa secara adil tanpa memihak atau diskriminatif terhadap latar belakang tertentu. Dalam hal ini, lembaga pendidikan berfungsi sebagai institusi sosial yang turut membentuk pola pikir dan sikap masyarakat terhadap pluralitas. Jika peran ini dijalankan secara maksimal, maka lembaga pendidikan akan menjadi agen perubahan yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan bersatu di tengah kemajemukan.

Urgensi Kontekstualisasi Kemajemukan dalam Kurikulum Islam

Pentingnya pengakuan terhadap kemajemukan sosial dan budaya harus tercermin dalam desain kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum yang eksklusif, yang hanya menekankan pada satu mazhab, pandangan politik, atau etnis tertentu, berisiko menciptakan intoleransi dan memupuk superioritas kelompok. Maka dari itu, diperlukan pendekatan kurikulum yang pluralistik dan moderat—sejalan dengan prinsip wasathiyah Islam.

Pendidikan yang inklusif terhadap kemajemukan bukan hanya bertujuan menciptakan kerukunan, tetapi juga membekali generasi muda dengan kemampuan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global yang semakin kompleks dan terhubung. Nilai-nilai seperti saling mengenal (ta'aruf), saling menghargai (ihtiram), dan bekerja sama dalam kebaikan (ta'awun) harus ditanamkan dalam proses pendidikan sejak dini.

Kontekstualisasi kemajemukan dalam kurikulum Islam merupakan upaya strategis untuk menjadikan nilai-nilai Islam relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat yang plural dan multikultural. Dalam hal ini, kurikulum pendidikan Islam tidak cukup hanya memuat ajaran normatif yang bersifat tekstual, tetapi juga harus diinterpretasikan dan disampaikan secara kontekstual sesuai dengan realitas sosial yang dihadapi peserta didik. Islam sendiri sebagai agama rahmatan lil 'alamin telah mengajarkan prinsip-prinsip hidup berdampingan, seperti ta'aruf (saling mengenal), tasamuh (toleransi), ta'awun (kerjasama), dan 'adl (keadilan). Nilai-nilai ini perlu diintegrasikan secara eksplisit ke dalam materi ajar, pendekatan pembelajaran, serta interaksi sosial di lingkungan pendidikan.

Kurikulum Islam yang kontekstual akan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga mampu menjadi agen perdamaian dan keadilan sosial di tengah keberagaman. Untuk itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan dimensi lokalitas dan realitas sosial peserta didik. Misalnya, dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, budaya, dan agama, penting untuk memasukkan tema-tema pembelajaran tentang pentingnya menghargai perbedaan, mencegah konflik antar kelompok, serta membangun solidaritas sosial. Hal ini tidak berarti mencairkan nilai-nilai Islam, tetapi justru memperkuatnya dalam kerangka yang lebih relevan dan solutif. Dengan demikian, kontekstualisasi kurikulum Islam dalam kemajemukan bukan hanya sebuah kebutuhan, melainkan keniscayaan dalam membentuk masyarakat yang damai, adil, dan beradab.

Nilai-Nilai Inklusif dalam Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sejatinya mengandung nilai-nilai universal yang menjunjung tinggi semangat inklusivitas. Inklusivitas dalam konteks ini berarti keterbukaan terhadap keberagaman, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan tanpa diskriminasi. Nilai-nilai inklusif dalam pendidikan Islam tidak hanya ditemukan dalam ajaran normatif Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga menjadi praktik etis dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam membangun masyarakat Madinah yang plural.

1. Tasamuh (Toleransi)

Toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, maupun pandangan hidup. Dalam pendidikan Islam, nilai tasamuh penting diajarkan untuk membentuk peserta didik yang mampu hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, sekalipun berbeda latar belakang. Al-Qur'an menegaskan:

"Lakum diinukum waliya diin" (Untukmu agamamu, dan untukku agamaku) (QS. Al-Kafirun: 6).

Toleransi bukan berarti menyamakan semua keyakinan, melainkan sikap menghormati hak orang lain dalam berkeyakinan dan mengekspresikan pandangan secara damai.

2. 'Adalah (Keadilan)

Islam menempatkan keadilan sebagai nilai sentral dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Keadilan berarti memberikan hak yang setara kepada setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, suku, agama, atau golongan. Dalam konteks pendidikan, keadilan menuntut akses yang sama dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan perlakuan yang adil dalam proses pembelajaran. Al-Qur'an menyatakan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90).

3. Ukhuwwah (Persaudaraan)

Pendidikan Islam mendorong pembentukan ukhuwah atau persaudaraan lintas batas: ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa), dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia). Konsep ini mengajarkan bahwa semua manusia adalah makhluk Allah yang patut dihormati dan dihargai.

Rasulullah SAW bersabda:

“Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya (kepada musuh).” (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Syura (Musyawarah/Demokrasi Partisipatif)

Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan kolektif. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam pendidikan, prinsip syura mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang dialogis, terbuka, dan menghargai pandangan peserta didik. Al-Qur'an menyatakan:

“...Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka...” (QS. Asy-Syura: 38).

5. Rahmah (Kasih Sayang)

Rahmah adalah inti dari ajaran Islam. Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nabi Muhammad diutus sebagai pembawa kasih sayang bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin). Dalam pendidikan Islam, rahmah menjadi landasan pendekatan pembelajaran yang penuh kepedulian, empati, dan kasih sayang terhadap sesama manusia.

“Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya': 107).

Nilai-nilai inklusif seperti tasamuh, 'adalah, ukhuwwah, syura, dan rahmah bukan hanya bagian dari doktrin normatif Islam, tetapi juga prinsip praktis yang harus diinternalisasikan dalam kurikulum dan proses pendidikan Islam. Implementasi nilai-nilai ini sangat penting dalam membentuk generasi yang religius, humanis, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat majemuk. Pendidikan Islam yang mengedepankan nilai-nilai ini akan berkontribusi pada pembangunan peradaban yang damai, adil, dan berkeadaban.

Urgensi Kurikulum Pendidikan Islam dalam Konteks Kemajemukan

Kemajemukan (pluralitas) adalah kenyataan sosiologis yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern, khususnya di negara seperti Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, budaya, dan latar belakang sosial ekonomi. Dalam konteks ini, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni dan kohesi sosial. Kurikulum pendidikan Islam sebagai instrumen formal dalam sistem pendidikan, menjadi sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang mampu merespons dan mengelola keberagaman secara arif dan inklusif.

1. Menanamkan Nilai-Nilai Universal Islam yang Inklusif

Kurikulum pendidikan Islam yang dirancang dengan pendekatan multikultural mampu menanamkan nilai-nilai dasar ajaran Islam seperti keadilan ('adalah), persaudaraan (ukhuwwah), kasih sayang (rahmah), toleransi (tasamuh), dan musyawarah (syura). Nilai-nilai ini bersifat universal dan mampu membangun kesadaran bahwa perbedaan adalah fitrah manusia (QS. Al-Hujurat: 13), (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2005).

Kurikulum yang tidak hanya menekankan aspek normatif-formal keagamaan, tetapi juga etika sosial Islam, sangat dibutuhkan untuk mencegah berkembangnya sikap eksklusif dan intoleran di tengah masyarakat yang plural. Kurikulum yang demikian menjadikan peserta didik tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga matang secara sosial dan empatik dalam interaksi lintas budaya dan agama. (Zakiyuddin Baidhaw, 2005)

2. Membentuk Karakter Moderat (Wasathiyah)

Urgensi lainnya adalah dalam pembentukan karakter keislaman yang moderat dan seimbang. Pendidikan Islam di era kemajemukan harus mampu mencegah lahirnya pandangan ekstrem atau radikal. Kurikulum yang mengintegrasikan nilai wasathiyah (moderat) sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 143) sangat penting agar peserta didik mampu melihat perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. (M. Amin Abdullah, 2006)

Pendidikan Islam yang tidak sensitif terhadap realitas sosial dapat berpotensi melahirkan narasi yang meminggirkan kelompok lain. Oleh karena itu, kurikulum harus mengakomodasi pembelajaran tentang Islam yang kontekstual, dialogis, dan inklusif terhadap keragaman sosial-kultural. (Syamsul Arifin, 2011)

3. Sebagai Sarana Integrasi Sosial dan Pencegah Disintegrasi

Kurikulum pendidikan Islam juga berfungsi sebagai media integrasi sosial yang mengajarkan pentingnya kohesi sosial, solidaritas, dan tanggung jawab antarwarga bangsa. Dalam masyarakat multikultural, kurikulum yang sensitif terhadap perbedaan budaya dan identitas mampu menjadi jembatan antar kelompok yang berbeda. Hal ini sangat relevan untuk membangun keutuhan bangsa di tengah tantangan globalisasi, sekularisme, dan potensi konflik sosial akibat perbedaan identitas. (Abuddin Nata, 2005)

4. Membangun Kesadaran Kewarganegaraan yang Religius

Kurikulum pendidikan Islam juga dapat memperkuat kesadaran kebangsaan dengan menanamkan nilai-nilai Islam yang mendukung hidup berbangsa secara damai dan konstitusional. Konsep seperti *hubbul wathan* (cinta tanah air), *maslahat* (kesejahteraan umum), dan *amar ma'ruf nahi munkar* dapat dimaknai dalam konteks membangun tatanan masyarakat yang adil dan beradab. (M. Dawam Rahardjo, 1996)

Kurikulum pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat ia dijalankan. Dalam masyarakat yang majemuk, kurikulum yang bersifat eksklusif dan rigid hanya akan memperlebar jurang perbedaan. Oleh karena itu, urgensi pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang responsif terhadap pluralitas menjadi keharusan. Kurikulum seperti ini harus berfungsi sebagai alat edukatif, integratif, dan transformatif yang mampu membina generasi yang religius sekaligus inklusif dan toleran.

Strategi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam yang Inklusif

Pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang inklusif menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi realitas sosial yang majemuk dan pluralistik. Kurikulum inklusif tidak hanya menekankan pada penguasaan materi keagamaan, tetapi juga memperhatikan keberagaman budaya, nilai sosial, serta kebutuhan peserta didik yang berbeda latar belakang. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang inklusif:

1. Integrasi Nilai Multikultural dan Pluralisme dalam Materi Pembelajaran

Strategi pertama adalah memasukkan nilai-nilai multikulturalisme, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman ke dalam setiap mata pelajaran dan tema pembelajaran. Kurikulum harus mampu mengajarkan bagaimana Islam menghargai perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, dan mempromosikan harmoni sosial. Penggunaan studi kasus kehidupan nyata dan narasi sejarah yang menunjukkan keberhasilan interaksi antar budaya dan agama sangat dianjurkan. (Zakiyuddin Baidhaw, 2005)

2. Pendekatan Kontekstual dan Tematik

Pengembangan kurikulum harus menggunakan pendekatan kontekstual yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kondisi sosial budaya peserta didik. Pendekatan tematik juga membantu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam satu tema yang relevan dengan isu

kemajemukan dan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif. (Syamsul Arifin, 2011)

3. **Pelibatan Berbagai Pihak dalam Penyusunan Kurikulum**

Strategi inklusif mengharuskan keterlibatan semua pemangku kepentingan, seperti guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan peserta didik itu sendiri dalam proses penyusunan kurikulum. Melalui musyawarah (*syura*), berbagai perspektif dan kebutuhan dapat diakomodasi sehingga kurikulum lebih responsif terhadap keberagaman peserta didik. (M. Amin Abdullah, 2004)

4. **Pengembangan Kompetensi Guru yang Sensitif terhadap Keberagaman**

Keberhasilan kurikulum inklusif sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menerapkan nilai-nilai inklusivitas. Oleh karena itu, pelatihan dan pembinaan guru yang menitikberatkan pada pemahaman multikulturalisme, toleransi, dan pendekatan pembelajaran yang dialogis dan partisipatif sangat penting. (Ahmad Tafsir, 2009)

5. **Penggunaan Metode Pembelajaran Partisipatif dan Dialogis**

Metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif peserta didik serta dialog terbuka antar siswa dari berbagai latar belakang dapat membangun kesadaran akan keberagaman dan memperkuat sikap toleransi. Pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan studi banding menjadi alternatif efektif dalam menginternalisasi nilai inklusif. (Haidar Bagir, 2017)

6. **Evaluasi Kurikulum secara Berkala dan Adaptif**

Pengembangan kurikulum inklusif juga memerlukan evaluasi berkelanjutan agar dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan peserta didik yang terus berubah. Evaluasi harus melibatkan umpan balik dari semua pemangku kepentingan untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum secara efektif. (Abuddin Nata, 2006)

Tantangan dan Solusi Implementasi

Implementasi kurikulum pendidikan Islam yang inklusif menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks masyarakat yang majemuk dan dinamis. Agar tujuan pendidikan Islam sebagai media pemersatu kemajemukan sosial dan kultur dapat tercapai, maka penting untuk mengenali tantangan-tantangan tersebut dan merumuskan solusi yang tepat.

1. Tantangan

a. **Resistensi terhadap Perubahan**

Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari berbagai pihak terhadap perubahan kurikulum yang bersifat inklusif. Guru, orang tua, atau masyarakat tertentu mungkin merasa khawatir bahwa pengajaran nilai inklusif dapat mengaburkan identitas keagamaan atau budaya mereka (Syamsul Arifin, 2011)

b. **Keterbatasan Kompetensi Guru**

Guru yang kurang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan pendekatan inklusif dan multikultural seringkali kesulitan mengelola kelas yang heterogen, sehingga implementasi kurikulum menjadi kurang optimal. (Ahmad Tafsir, 2009)

c. **Kurangnya Sumber Belajar yang Relevan**

Bahan ajar yang memuat nilai-nilai inklusif dan multikultural masih terbatas, sehingga guru harus berusaha keras mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. (Zakiyuddin Baidhaw, 2005)

d. **Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya**

Lingkungan sosial dan budaya di luar sekolah yang cenderung eksklusif atau intoleran dapat menjadi hambatan besar dalam menginternalisasi nilai-nilai inklusif di sekolah. (M. Amin Abdullah, 2004)

e. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Beberapa sekolah, terutama di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan fasilitas dan teknologi pendukung yang dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran inklusif secara maksimal. (Abuddin Nata, 2006)

2. Solusi

a. Sosialisasi dan Pendampingan terhadap Stakeholder

Melakukan sosialisasi yang intensif kepada guru, orang tua, dan masyarakat tentang pentingnya nilai inklusif dalam pendidikan Islam dapat mengurangi resistensi. Pendampingan dan pelatihan berkala bagi guru juga sangat diperlukan untuk memperkuat kompetensi mereka dalam mengelola keberagaman kelas.

b. Pengembangan Kompetensi Guru melalui Pelatihan Multikultural

Mengadakan pelatihan khusus mengenai pendidikan multikultural dan strategi pembelajaran inklusif agar guru mampu mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dan efektif dalam konteks kemajemukan sosial.

c. Penyediaan dan Pengembangan Sumber Belajar Inklusif

Mendorong pengembangan buku teks, modul, dan media pembelajaran yang mengandung nilai-nilai inklusif serta sesuai dengan kondisi sosial budaya peserta didik.

d. Pemberdayaan Lingkungan Sekolah dan Masyarakat

Membangun kerja sama yang erat antara sekolah dengan keluarga dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan inklusif, serta mengadakan kegiatan bersama yang menanamkan nilai toleransi dan persaudaraan.

e. Peningkatan Fasilitas dan Teknologi Pendidikan

Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk teknologi informasi, guna mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan beragam, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.

f. Kurikulum yang Belum Terintegrasi dengan Realitas Sosial

Tantangan berikutnya adalah kurikulum pendidikan Islam di beberapa lembaga pendidikan masih bersifat normatif dan belum terintegrasi dengan realitas sosial yang kompleks. Materi ajar yang terlalu berorientasi pada aspek ritual dan dogmatis membuat peserta didik kurang memiliki sensitivitas sosial, sehingga tidak siap menghadapi tantangan keberagaman budaya dan keyakinan di masyarakat. (Azyumardi Azra, 1999)

Solusi:

Kurikulum perlu diarahkan pada pendekatan integratif dan kontekstual, di mana nilai-nilai keislaman dihubungkan langsung dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan materi ajar berbasis studi kasus, integrasi ilmu sosial, serta praktik langsung dalam bentuk kegiatan sosial yang menumbuhkan empati dan keterlibatan peserta didik dalam kehidupan nyata.

g. Minimnya Evaluasi terhadap Efektivitas Kurikulum Inklusif

Evaluasi kurikulum sering kali hanya berfokus pada aspek kognitif atau akademik, sementara aspek afektif dan sosial—yang menjadi pilar utama dari pendidikan inklusif—sering terabaikan. Akibatnya, keberhasilan implementasi nilai-nilai inklusif tidak dapat terukur secara jelas.

Solusi:

Diperlukan sistem evaluasi yang menyeluruh, tidak hanya mencakup aspek pengetahuan, tetapi juga sikap, perilaku, dan kemampuan sosial peserta didik. Evaluasi kualitatif melalui observasi, refleksi siswa, dan penilaian berbasis proyek sosial bisa menjadi alternatif dalam menilai internalisasi nilai inklusif secara utuh. (Syamsul Arifin, 2011)

h. Ketimpangan Kualitas Pendidikan antar Wilayah

Perbedaan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi hambatan serius dalam pemerataan kurikulum inklusif. Banyak sekolah di wilayah terpencil belum memiliki akses ke pelatihan guru, media pembelajaran modern, maupun literatur pendidikan yang mutakhir.

Solusi:

Pemerintah dan lembaga pendidikan harus berkolaborasi untuk menyediakan akses dan fasilitas pelatihan yang merata. Penggunaan teknologi seperti e-learning dan pengiriman modul digital dapat menjadi jembatan solusi untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses secara fisik.

KESIMPULAN

Kurikulum pendidikan Islam memiliki peran strategis sebagai media pemersatu dalam menghadapi kemajemukan sosial dan kultur di masyarakat. Dengan menanamkan nilai-nilai inklusif seperti toleransi, keadilan, kasih sayang, dan moderasi, kurikulum ini dapat membentuk peserta didik yang tidak hanya religius, tetapi juga mampu menghargai keberagaman dan membangun harmoni sosial. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang inklusif membutuhkan strategi yang meliputi integrasi nilai multikultural, pendekatan kontekstual, partisipasi berbagai pemangku kepentingan, peningkatan kompetensi guru, metode pembelajaran dialogis, serta evaluasi yang adaptif. Meski menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi, keterbatasan kompetensi guru, dan kurangnya sumber belajar yang relevan, solusi-solusi seperti pelatihan guru, sosialisasi kepada masyarakat, pengembangan bahan ajar, dan pemberdayaan lingkungan sekolah dapat memperkuat implementasi kurikulum inklusif tersebut. Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam yang inklusif dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan berkeadaban di tengah keberagaman sosial budaya.

REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
Abuddin Nata, Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2006),
Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Praktis (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),
Abuddin Nata, Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas (Jakarta: Prenada Media, 2005),
Ahmad Tafsir, Guru dan Pendidikan Multikultural (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
Ahmad Tafsir, Guru dan Pendidikan Multikultural (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III (Jakarta: Kencana, 2012),
Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Prenada Media, 2006),
Clifford Geertz, Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973),
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), QS. Al-Kafirun: 6.
Haidar Bagir, Islam Tuhan Islam Manusia (Bandung: Mizan, 2017),
Hasan Langgugung, Pendidikan Islam dan Perannya dalam Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986),
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),
M. Amin Abdullah, Islam dan Pendidikan: Telaah Pemikiran dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),
M. Amin Abdullah, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
M. Amin Abdullah, Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),

- M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Sosial dari Kitab Suci* (Jakarta: Paramadina, 1996),
Muhammad Ali, *Islam dan Pluralisme* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003),
Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis no. 2442.
Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006),
Syamsul Arifin, *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris* (Yogyakarta: LKiS, 2011),
Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Multikultural Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2005),